

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2010-2015

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

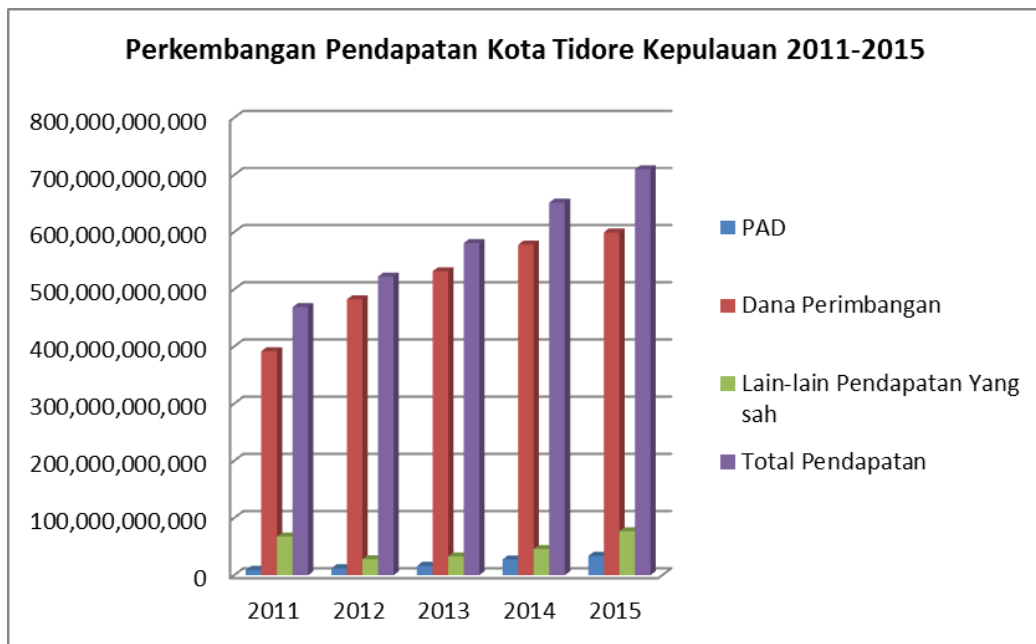
Kinerja pelaksanaan Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan meliputi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan undang-undang nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil pajak/bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh, 21,22,23 dan 24), Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Kelompok Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kinerja keuangan daerah dari sisi pendapatan selama pelaksanaan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 – 2015 secara umum menunjukkan peningkatan. Selama kurun waktu 5 tahun, terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 241.326.092.431,71.-,

namun demikian sebagian besar pendapatan masih sangat bergantung pada kontribusi dana perimbangan yang setiap tahun rata-rata sebesar 88,06 persen. Rata-rata kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 5,73 persen terhadap total pendapatan daerah pertahun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 73,90 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 8,44 persen. Sementara itu rata-rata peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir sangat kecil yakni sebesar 3,37 persen per tahun, dengan rincian Pajak Daerah 0,79 persen, Retribusi Daerah 1,65 persen dan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan 0,04 persen dan Lain-Lain PAD yang Sah 0,89 persen. Peranan PAD dalam pembentukan penerimaan daerah dan ketergantungan yang sangat besar terhadap dana perimbangan menunjukkan kecilnya tingkat kemandirian fiskal di Kota Tidore Kepulauan. Untuk dapat melihat perkembangan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut :

Gambar 3.1.



Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan

Untuk mengetahui realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine

Tabel 3.1
Realisasi APBD Kota Tidore Kepulauan 2011-2015

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1.	PENDAPATAN	468,721,078,938.20	522,431,156,662.16	580,940,162,625.96	651,764,985,520.60	710,047,171,369.91
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	9,227,496,644.20	11,948,948,637.16	16,351,196,253.70	27,672,173,876.51	33,695,174,504.91
1.1.1	Pajak Daerah	3,557,767,272.00	4,728,967,061.00	4,306,198,048.04	5,012,335,900.00	5,547,372,952.00
1.1.2	Retribusi Daerah	3,154,997,402.00	4,166,697,922.00	6,848,126,786.00	15,497,209,940.00	18,824,428,940.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	155,486,100.00	189,674,647.00	211,089,720.00	615,545,811.00	-
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	2,359,245,870.20	2,863,609,007.16	4,985,781,699.66	6,547,082,225.51	9,323,372,612.91
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	9,227,496,644.20	11,948,948,637.16	16,351,196,253.70	27,672,173,876.51	33,695,174,504.91
1.2.	Dana Perimbangan	391,869,539,195.00	482,326,921,364.00	531,496,530,824.00	578,229,073,278.00	599,668,846,993.00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	37,807,071,195.00	39,309,785,364.00	33,100,204,824.00	31,672,891,278.00	26,164,908,993.00
1.2.2	Dana alokasi Umum	313,336,768,000.00	399,531,966,000.00	443,177,446,000.00	497,417,022,000.00	514,588,698,000.00
1.2.3	Dana Alokasi khusus	40,725,700,000.00	43,485,170,000.00	55,218,880,000.00	49,139,160,000.00	58,915,240,000.00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	67,624,043,099.00	28,155,286,661.00	33,092,435,548.26	45,863,738,366.09	76,683,149,872.00
1.3.1	Hi bah	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	3,057,727,139.00	4,015,990,439.00	2,018,584,272.00	5,693,814,362.00	12,261,522,872.00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	64,541,155,600.00	24,113,384,000.00	31,003,487,500.00	40,129,924,000.00	64,421,627,000.00
1.3.5	Bantuan keuangan dari propinsi atau Pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	25,160,360.00	25,912,222.00	70,363,776.26	40,000,004.09	

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, rata-rata realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 586.780.911.023.-. Target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah perubahan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 pada akhir tahun anggaran dapat direalisasi secara optimal bahkan melebihi target yang direncanakan. Hal ini terlihat dari hasil realisasi pendapatan daerah pada tahun 2011 yang sebesar 102,36 persen dengan nilai total penerimaan sebanyak Rp. 468.721.078.938.20.- yang melampaui target pendapatan yang sebanyak Rp. 457.901.120.916.-. Hal ini juga berlaku pada tahun 2012 dengan total realisasi pendapatan sebanyak 103,61 persen, tahun 2013 terrealisasi sebanyak 100,50 persen, dan tahun 2014 sebanyak 100,82 persen. Sementara untuk tahun 2015, target pendapatan yang direncanakan setelah penetapan perubahan APBD, hanya dapat direalisasi sebanyak 99,49 persen dari nilai Rp. 840.000.000.- atau sebesar Rp. 710.047.171.369.91.-.

Perencanaan penganggaran yang tertuang dalam APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 secara umum dapat direalisasi dengan baik meskipun pada beberapa komponen belum maksimal dalam kinerjanya. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan komponen PAD yang belum maksimal kontribusinya terhadap pendapatan daerah, hal ini terlihat dari data tahun 2011 dimana realisasinya hanya 29,53 persen. Tahun 2012 realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat menjadi 33,81 persen dan tahun 2013 juga meningkat menjadi 35,18 persen serta 256,48 persen pada tahun 2014. Namun demikian, pada tahun 2015 penetapan target APBD untuk pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 840 juta tidak dapat terealisasi hingga akhir tahun anggaran.

Perbandingan target pendapatan daerah setelah perubahan dan realisasi pendapatan daerah setiap tahun dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini:

RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi APBD Kota Tidore Kepulauan 2010-2015

No	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015	
		Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)
1	PENDAPATAN	457,901,120,916	102.36	504,248,333,000	103.60	578,024,191,896	100.49	646,478,587,000	100.81	713,691,092,887	99.49
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	8,530,000,000	108.18	8,500,000,000	140.58	14,032,634,000	116.52	28,906,800,000	95.73	34,617,751,100	97.33
1.1.1	Pajak Daerah	2,323,500,000	153.12	2,561,000,000	184.65	3,485,000,000	123.56	4,167,500,000	120.27	5,860,000,000	94.67
1.1.2	Retribusi Daerah	3,040,000,000	103.78	3,358,000,000	124.08	7,141,634,000	95.89	20,572,815,000	75.33	19,084,438,000	98.64
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	526,500,000	29.53	561,000,000	33.81	600,000,000	35.18	240,000,000	256.48	840,000,000	0.00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	2,640,000,000	89.37	2,020,000,000	141.76	2,806,000,000	177.68	3,926,485,000	166.74	8,833,313,100	105.55
1.2.	Dana Perimbangan	382,713,490,316	102.39	469,537,136,000	102.72	529,599,235,000	100.36	574,758,182,000	100.60	607,370,342,193	98.73
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	28,651,022,316	131.96	26,520,000,000	148.23	31,202,909,000	106.08	28,202,000,000	112.31	33,866,404,193	77.26
1.2.2	Dana alokasi Umum	313,336,768,000	100.00	399,531,966,000	100.00	443,177,446,000	100.00	497,417,022,000	100.00	514,588,698,000	100.00
1.2.3	Dana Alokasi khusus	40,725,700,000	100.00	43,485,170,000	100.00	55,218,880,000	100.00	49,139,160,000	100.00	58,915,240,000	100.00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	66,657,630,600	101.41	26,211,197,000	107.32	34,392,322,896	96.02	42,813,605,000	107.03	71,702,999,594	106.95
1.3.1	Hibah	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
1.3.2	Dana darurat	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	2,194,000,000	139.37	2,260,000,000	177.70	2,500,000,000	80.74	3,000,000,000	189.79	7,281,372,594	168.40
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	64,463,630,600	100.12	23,951,197,000	100.68	31,892,322,896	97.21	39,813,605,000	100.79	64,421,627,000	100.00
1.3.5	Bantuan keuangan dari propinsi atau Pemerintah daerah lainnya	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00

Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan

3.1.1. Analisa Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

3.1.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah dibanding Anggaran

Dilihat dari Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka tidak semua pendapatan daerah yang ada dapat direalisasikan 100% dalam belanja daerah. Data 5 Tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung berkisar antara 9,01% dari realisasi yang terendah pada item Belanja Tidak Terduga hingga realisasi yang tertinggi 232,76% pada item Belanja Hibah Sedangkan realisasi Belanja Langsung berkisar antara 84,35% dari realisasi yang terendah pada item belanja barang dan jasa hingga realisasi yang tertinggi pada kisaran 97,36% pada item belanja pegawai.

Secara total, realisasi belanja daerah pada tahun 2011 adalah sebesar 93,72 persen dari rencana belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD perubahan yang bernilai Rp. 484.810.209.433,17.- dengan komponen belanja langsung sebanyak Rp. 251.572.740.468.-, dan komponen belanja tidak langsung sebanyak Rp. 233.237.468.965,17.-. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa rencana total belanja daerah adalah sebanyak Rp. 543.923.075.577,54-, dan terealisasi sebanyak 90,82 persen. Selanjutnya di tahun 2013, belanja daerah yang dapat direalisasi adalah sebesar 92,76 persen dari total belanja yang direncanakan sebesar Rp. 644.422.867.274.-. Untuk tahun 2014 realisasi belanja daerah sebanyak 92,26 persen dari total anggaran yang direncanakan yakni sebanyak Rp.694.287.361.452.-, sementara untuk tahun 2015 dapat direalisasikan belanja daerah sebanyak 94,42 persen dari target Rp. 770.377.818.060.-

Untuk melihat Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine

Tabel 3.3
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Target Anggaran Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015	
		Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)
2	BELANJA DAERAH										
2.1.	Belanja Tidak Langsung	233,237,468,965.17	95.02	272,715,191,376.54	85.63	281,613,022,500.00	92.28	311,529,692,603.00	93.81	361,833,808,013.00	96.10
2.1.1	Belanja Pegawai	207,296,844,036.00	96.34	254,900,796,376.00	87.07	256,347,531,500.00	93.88	289,130,803,000.00	91.74	313,607,267,013.00	92.95
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	1,818,925,000.00	-	8,064,395,000.00	68.57	7,955,000,000.00	93.34	6,392,850,000.00	232.76	19,550,000,000.00	155.96
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13,190,000,000.00	83.34	7,750,000,000.00	24.20	2,521,000,000.00	38.32	1,780,000,000.00	90.48	400,000,000.00	49.92
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	4,875,000,000.00	99.99	4,000,000,000.00	99.31	9,289,491,000.00	99.18	9,711,407,000.00	99.55	25,276,541,000.00	99.87
2.1.8	Belanja Tak Terduga	6,056,699,929.17	69.04	4,000,000,000.54	9.01	5,500,000,000.00	20.53	4,514,632,603.00	18.76	3,000,000,000.00	13.97
2.2.	Belanja Langsung	251,572,740,468.00	92.53	271,207,884,201.00	95.97	362,809,844,774.00	93.14	382,757,668,849.00	90.99	408,544,010,047.00	92.94
2.2.1	Belanja Pegawai	15,384,552,737.00	92.61	19,360,232,681.00	97.36	31,142,447,900.00	92.21	34,785,573,000.00	96.72	2,708,376,900.00	96.37
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109,007,265,719.00	91.66	20,795,654,547.77	94.56	141,297,051,769.00	91.38	170,647,784,048.00	84.35	182,507,474,613.00	87.68
2.2.3	Belanja Modal	127,180,922,012.00	93.26	131,051,996,972.23	97.05	190,370,345,105.00	94.59	177,324,311,801.00	96.26	193,328,158,534.00	97.32
	Total Belanja Daerah	484,810,209,433.17	93.72	543,923,075,577.54	90.82	644,422,867,274.00	92.76	694,287,361,452.00	92.26	770,377,818,060.00	94.42

Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi belanja daerah selalu mengalami kenaikan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dan rata-rata pertumbuhan belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung. Target dan realisasi Belanja daerah mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2011-2015, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Data di atas juga menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2015 menunjukkan dominasi belanja langsung dalam komponen belanja di Kota Tidore Kepulauan. Namun demikian, dalam periode tersebut nilai belanja tidak langsung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2011 persentase belanja tidak langsung terhadap total belanja sebesar 95,02 persen, menurun menjadi 85,63 persen di tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2013 proporsinya menjadi sebesar 92,28 persen dan meningkat di tahun 2014 menjadi 93,81 persen serta 96,10 persen di tahun 2015.

Komponen belanja tidak langsung terbesar adalah belanja pegawai dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 belanja pegawai mendominasi sebesar 90,34 persen menurun menjadi sebesar 83,80 persen di tahun 2015. Sementara komponen belanja langsung terbesar adalah belanja modal. Pada tahun 2011 proporsi belanja modal terhadap total belanja langsung adalah sebanyak 51,13 persen dan meningkat sebesar 49,57 persen di tahun 2015.

3.1.1.2. Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur di Kota Tidore Kepulauan mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Dapat dilihat dari realisasi belanja pemenuhan aparatur tahun 2011 sebesar 274,696,040,946 pada tahun 2012 sebesar Rp. 312,104,102,393, tahun 2013 sebesar Rp. 355,082,723,655 kemudian di tahun 2014 sebesar Rp. 381,447,499,657 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 405,988,457,546. Data tersebut dapat terlihat pada tabel 3.4 berikut :

RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
		2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	199,716,081,855.00	221,945,485,331.00	240,663,907,668.00	265,241,872,994.00	291,386,685,392.00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	180,606,730,638.00	193,122,352,504.00	205,224,757,167.00	215,972,648,236.00	240,160,807,143.00
2	Tambahan Penghasilan	16,733,831,093.00	26,997,668,360.00	33,993,280,970.00	47,685,461,444.00	49,159,972,792.00
3	Belanja Anggota DPRD dan Operasional KDH/WKDH	673,994,000.00	674,000,000.00	1,177,992,000.00	1,276,800,000.00	1,544,050,000.00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1,701,526,124.00	1,151,464,467.00	267,877,531.00	306,963,314.00	521,855,457.00
B.	BELANJA LANGSUNG	74,979,959,091.00	90,158,617,062.00	114,418,815,987.00	116,205,626,663.00	114,601,772,154.00
1	Belanja Honorarium PNS	7,056,419,810.00	9,036,785,823.00	17,271,200,611.00	18,043,469,092.00	15,537,646,550.00
2	Belanja Uang Lembur	101,871,500.00	165,247,000.00	203,268,000.00	176,739,000.00	124,829,000.00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1,272,515,000.00	598,175,000.00	806,400,000.00	914,440,000.00	983,290,000.00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	2,909,444,000.00	3,687,634,058.00	5,560,580,300.00	5,346,839,150.00	2,270,333,100.00
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	688,787,869.00	1,003,310,973.00	1,500,675,043.00	2,026,039,356.00	2,018,336,625.00
6	Belanja Makanan dan Minuman	4,462,839,800.00	6,122,271,360.00	9,754,098,160.00	11,180,337,100.00	13,927,394,466.00
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	448,736,450.00	926,087,750.00	979,355,000.00	1,098,423,100.00	1,091,013,880.00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	534,113,750.00	338,865,325.00	760,935,000.00	794,656,000.00	643,561,200.00
9	Belanja Perjalanan Dinas	42,543,123,500.00	51,796,367,470.00	56,185,547,158.00	59,338,161,463.00	57,546,352,099.00
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	18,950,000.00	21,000,000.00	0	0	0
11	Belanja Pemulangan Pegawai	378,100,000.00	80,000,000.00	0	145,000,000.00	0
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Mobilair, Dll)	14,565,057,412.00	16,382,872,303.00	21,396,756,715.00	17,141,522,402.00	20,459,015,234.00
	Total	274,696,040,946.00	312,104,102,393.00	355,082,723,655.00	381,447,499,657.00	405,988,457,546.00

Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan

Jika ditinjau dari besaran Proporsi Belanja Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran daerah selama tahun 2011 sampai tahun 2015 terlihat bahwa prosentasi belanja aparatur pada periode tersebut cenderung fluktuatif dan proporsi Belanja terbesar berada di tahun 2012 sebesar 62,80% dan Proporsi belanja terkecil berada pada level 55,23% di Tahun 2015. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN)	PROSEN TASE
1.	Tahun Anggaran 2010	226,646,612,214.00	389,842,727,385.00	58.14
2.	Tahun Anggaran 2011	274,696,040,946.00	456,011,695,077.83	60.24
3.	Tahun Anggaran 2012	312,104,102,393.00	496,975,504,653.00	62.80
4.	Tahun Anggaran 2013	355,082,723,655.00	599,794,139,287.17	59.20
5.	Tahun Anggaran 2014	381,447,499,657.00	642,531,278,510.00	59.37
6.	Tahun Anggaran 2015	402,479,327,312.00	728,763,721,344.00	55.23
	Jumlah	1,952,456,306,177.00	3,313,919,066,257.00	58.92

Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan

3.1.1.3 Analisa Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang hanya nampak terjadi pada tahun 2015, yang harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran. Jumlah pengeluaran wajib dan mengikat ini ditahun 2011 berjumlah Rp. 210,201,432,356.- Angka ini mengalami kenaikan prosentase dari tahun 2011 ke Tahun 2012 sebesar 2.36 persen. Kemudian ke tahun 2013 pun mengalami kenaikan sebesar 2,65 persen, dan selanjutnya di tahun 2014 pun mengalami kenaikan sebesar 2,93 persen dan selanjutnya ketahun 2015 kenaikan sebesar 3,36 persen.

RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine

Tabel 3.6
Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata- Rata (%)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	197,340,561,731	220,120,020,864	239,218,038,137	263,658,109,680	289,320,779,935	3,7
1	Gaji dan Tunjangan	180,606,730,638	193,122,352,504	205,224,757,167	215,972,648,236	240,160,807,143	3,8
2	Tambahan Penghasilan	16,733,831,093	26,997,668,360	33,993,280,970	47,685,461,444	49,159,972,792	1.2
3	Belanja Bunga						
4	Belanja Bagi Hasil						-2.1
B.	BELANJA LANGSUNG	12,860,870,625	16,429,382,802	26,112,917,633	29,541,292,339	46,584,365,084	1.2
1	Honorarium PNS	7,056,419,810	9,036,785,823	17,271,200,611	18,043,469,092	15,537,646,550	1.5
2	Beasiswa Pendidikan PNS	1,272,515,000	598,175,000	806,400,000	914,440,000	983,290,000	9.8
3	Belanja Jasa Kantor	2,714,295,815	4,140,796,979	4,675,077,022	7,169,393,247	26,517,416,534	1.4
4	Belanja Sewa Gedung	574,475,000	694,550,000	906,595,000	865,650,000	887,800,000	5.7
5	Belanja Sewa Perlengkapan	275,215,000	694,550,000	665,035,000	766,760,000	1,012,640,500	6.8
6	Sewa Sarana Mobilitas	967,950,000	1,264,525,000	1,788,610,000	1,781,580,000	1,645,571,500	1.6
C	PEMBIAYAAN PENGELUARAN	-	-	-	-	335,945,362	
	Dana Cadangan						
	Pembayaran Pokok Hutang					335,945,362	
	Total (a+b+c)	210,201,432,356	236,549,403,666	265,330,955,770	293,199,402,019	336,241,090,381	5.00
	Total Rata-rata (%)	1.50	1.48	3.01	1.22	2.54	
	% Kenaikan/Penurunan		11	13	8	8	

Sumber : Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan

Jika ditinjau rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya, maka pertumbuhan terbesar berasal dari Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar 9,8 persen pada item Belanja Langsung dan rata-rata pertumbuhan belanja langsung sebesar 1,2 persenan belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan hanya sebesar 3,7 persen dan pertumbuhan terbesar berasal dari Gaji dan Tunjangan Sebesar 3,8 Persen.

3.1.2 Analisa Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi surplus/defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan berasal dari pembayaran kembali pokok pinjaman, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Analisa ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui :

Berdasarkan data APBD Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2011 sampai tahun 2015, terlihat bahwa penerimaan pembiayaan daerah masih didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA). Pada tahun 2011, SILPA mencapai Rp. 29.819.004.017,17 dan terus meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 59.042.481.463,09.-. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan hanya diperuntukkan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, yakni Rp. 1.909.915.500,00.- pada tahun 2011, kemudian meningkat menjadi Rp. 3.000.000.000.- pada tahun 2012, sementara di tahun 2013 dan tahun 2014 turun menjadi Rp. 2.000.000.000,-. Untuk tahun 2015 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah turun menjadi Rp. 1.000.000.000,-.

3.1.2.1 Analisa Sumber Penutup Defisit Riil

Analisa ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Gambaran terkait sumber penutup defisit riil selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine

Tabel 3.7
Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	468,721,078,938.20	522,431,156,662.16	580,940,162,625.96	651,764,985,521.00	710,047,171,369.91
	Dikurangi					
2	Belanja Daerah	454,101,779,577.83	493,975,504,653.00	597,794,139,287.17	640,531,278,510.00	727,427,775,982.00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,909,915,500.00	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,335,945,362.00
A	DEFISIT RILL	12,709,383,860.37	25,455,652,009.16	(18,853,976,661.21)	9,233,707,011.00	(18,716,549,974.09)
4	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan	29,965,358,717.17	42,943,023,369.54	68,662,751,113.70	49,808,774,452.00	59,042,481,463.09
5	Pencairan Dana Cadangan					
6	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan					
7	Penerimaan Pinjaman Daerah					
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
9	Penerimaan Piutang Daerah					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	29,965,358,717.17	42,943,023,369.54	68,662,751,113.70	49,808,774,452.00	59,042,481,463.09
	SILPA Tahun Berkenaan	42,674,742,577.54	68,398,675,378.70	49,808,774,452.49	59,042,481,463.00	40,325,931,489.00

Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan

Dari tabel 3.7 yang tersaji diatas menunjukkan kecenderungan adanya pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2011 Realisasi Belanja Daerah masih dibawah (lebih kecil) dari pada realisasi pendapatan, yang berarti tidak terjadi defisit anggaran atau surplus sebesar Rp.12,709,383,860,37 sehingga tidak diperlukan anggaran penutup defisit riil pada tahun 2011, oleh karena itu SiLPA tahun sebelumnya tidak dialokasikan guna menutup defisit melainkan dialokasi sepenuhnya sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun berkenaan dan akan menambah SiLPA tahun berkenaan yang kemudian menjadi bagian dari SiLPA tahun sebelumnya pada tahun 2012. Hal ini juga terjadi untuk tahun 2012 dan tahun 2014 yang mengalami kondisi yang sama yaitu Surplus Anggaran. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi defisit anggaran sebesar Rp.18,853,976,661,21 sehingga diperlukan anggaran penutup defisit pada tahun 2013 dengan menggunakan SiLPA tahun 2012, sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun berkenaan akan berkurang sebesar defisit pada tahun 2013. Demikian pula untuk tahun 2015 yang mengalami defisit anggaran sebesar Rp.18,716,549,974,09

Berdasarkan analisis di atas, gambaran komposisi penutup defisit riil dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015

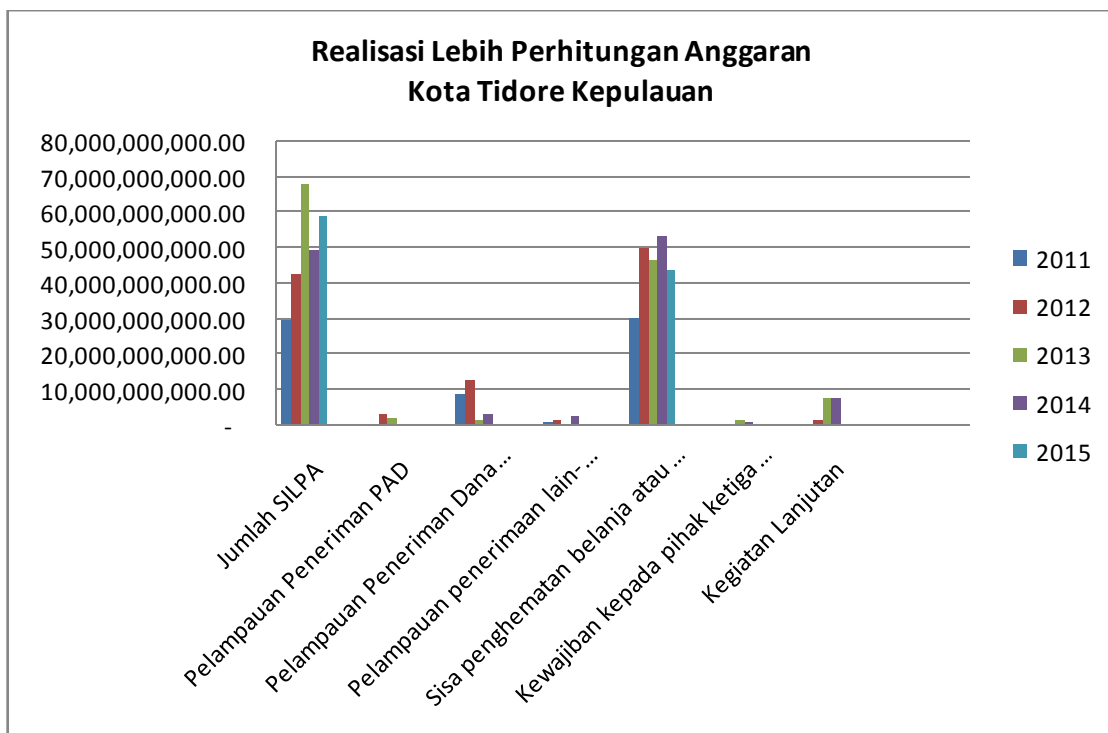
NO	URAIAN	Proporsi dari Total Defisit riil				
		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1.	SILPA tahun anggaran sebelumnya	203,97	149,97	-405,83	443,39	-339,70
2.	Pencairan Dana Cadangan					
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
4.	Penerimaan pinjaman daerah					
5.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	1,00	0,94	-1,57		
6.	Penerimaan piutang daerah					
7.	SILPA tahun berkenaan	291,91	240,37	-295,53	525,58	-232,02

* Sumber : BPKAD Kota Tidore Kepulauan

3.1.2.2 Analisa Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Berkaitan dengan keberadaan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SILPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SILPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah.

SILPA yang terdapat pada APBD Kota Tidore Kepulauan sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SILPA tersebut diharapkan untuk rencana ke depan jumlah SILPA Kota Tidore Kepulauan dapat diperkecil.



Gambaran terkait komposisi realisasi anggaran SILPA Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut :

RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine

Tabel 3.9
Realisasi sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015

N O	URAIAN	2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	% DARI SILPA	Rp	% DARI SILPA	Rp	% DARI SILPA	Rp	% DARI SILPA	Rp	% DARI SILPA
1.	Jumlah SILPA	42,674,742,577.54		68,398,675,378.70		49,808,774,452.00	100	59,042,481,463.09	100	40,325,931,489.00	100
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	697,496,644.20	1,63	3,448,948,637.16	5,04	2,318,562,253.70	4,65	-1,234,626,123.49	-2.09	-922,576,595.09	-2.29
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	9,156,048,879.00	21,46	12,789,785,364.00	18,70	1,897,295,824.00	3,81	3,470,891,278.00	5.88	-7,701,495,200.00	-19.10
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	966,412,499.00	2,26	1,944,089,661.00	2,84	597,408,476.26	1,20	3,050,133,366.09	5.17	4,980,150,278.00	12.35
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	30,438,013,655.34	71,33	49,947,570,924.54	73,02	46,628,727,986.83	93,62	59,042,481,462.60	100.00	39,306,120,560.91	97.47
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan	62,944,905.09	-0,15			1,695,776,533.00	3,40	998,618,500.00	1,69	2,155,337,529.00	5,34
7.	Kegiatan Lanjutan			1,495,603,733.00	3,50	7,735,377,503.00	11,31	8,156,815,221.00	16,38		

Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan

Komposisi penerimaan pembiayaan masih didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dari tabel 3.9, terlihat adanya kecenderungan pergerakan yang fluktuatif atas Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 – 2015. Pada tahun 2012 jumlah SiLPA mengalami kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan dengan penerimaan SiLPA pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp25.723.932.801,16. Sedangkan pada tahun 2013, dibandingkan dengan penerimaan SiLPA dalam tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 72,27% atau Rp18.589.900.926,70 dari penerimaan SiLPA tahun 2011. Jika dibandingkan dengan penerimaan SiLPA dalam tahun 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar dalam tahun 2014 yaitu sebesar Rp 9.233.707.010,60 meskipun pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi Rp 40.325.931.489,00. Di masa mendatang diharapkan SiLPA harus semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan

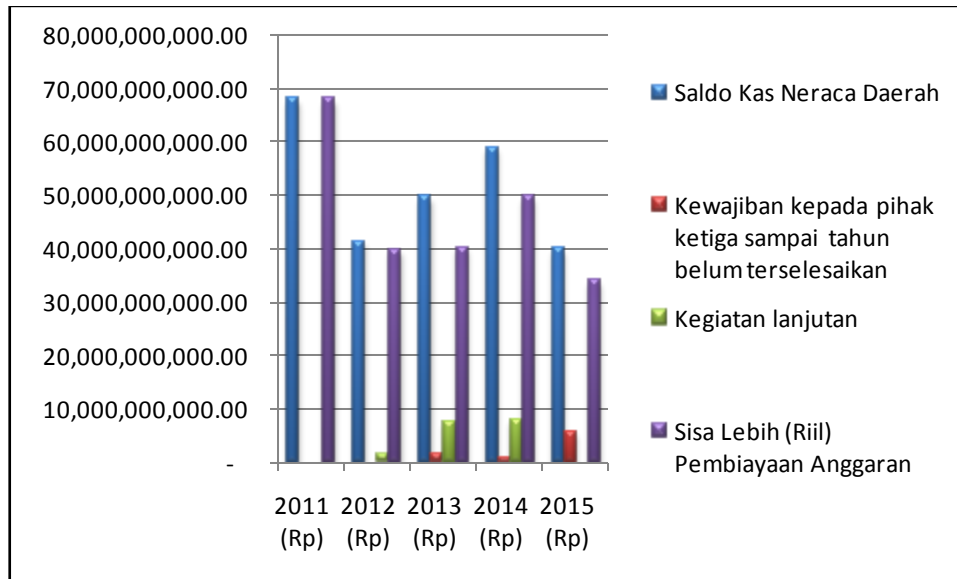
3.1.2.3 Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisa ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Gambaran SiLPA dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1.	Saldo kas neraca Daerah	41,457,317,649.53	68,143,542,762.79	49,776,395,706.58	59,040,193,363.09	40,037,057,541.00
	Dikurangi					
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai tahun belum terselesaikan	62,944,905.09	-	1,695,776,536.09	998,618,500.00	2,155,337,529.00
3.	Kegiatan lanjutan	-	1,495,603,733.00	7,735,377,503.00	8,156,815,221.00	
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	41,394,372,744.44	66,647,939,029.79	40,345,241,667.49	49,884,759,642.09	37,881,720,012.00

Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan



SiLPA tahun berkenaan merupakan suatu indikator yang cukup krusial dalam realisasi APBD. SiLPA tahun berkenaan yang merupakan selisih positif antara surplus/defisit dengan netto pembiayaan akan menunjukkan kinerja realisasi anggaran secara keseluruhan. Semakin tinggi SiLPA tahun berkenaan, maka semakin rendah kinerja pengelolaan APBD secara keseluruhan. SiLPA tahun berkenaan menunjukkan total dana *idle* pada akhir tahun yang telah berjalan. SiLPA tahun berkenaan akan menjadi SiLPA tahun sebelumnya pada tahun berikutnya.

SiLPA tahun berkenaan pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mempunyai nilai yang cukup besar dan bernilai positif, artinya bahwa pemerintah daerah bisa menutup belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada tahun tersebut.

3.1.2.4 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 tahun ke depan.

RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine

Tabel 3.11
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	PENDAPATAN	770,355,297,749	831,557,522,415	892,759,747,082	953,961,971,748	1,015,164,196,414
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	39,176,572,272	45,642,430,368	52,108,288,464	58,574,146,561	65,040,004,657
1.1.1	Pajak Daerah	5,909,302,306	6,335,560,326	6,761,818,346	7,188,076,366	7,614,334,386
1.1.2	Retribusi Daerah	22,499,104,726	26,766,042,236	31,032,979,745	35,299,917,254	39,566,854,764
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	268,828,945	280,318,841	291,808,738	303,298,634	314,788,530
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	10,499,336,295	12,260,508,965	14,021,681,636	15,782,854,306	17,544,026,977
1.2.	Dana Perimbangan	670,168,412,584	721,318,489,335	772,468,566,086	823,618,642,837	874,768,719,588
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	24,334,606,784	21,242,484,935	18,150,363,086	15,058,241,237	11,966,119,388
1.2.2	Dana alokasi Umum	583,727,054,800	633,765,946,400	683,804,838,000	733,843,729,600	783,882,621,200
1.2.3	Dana Alokasi khusus	62,106,751,000	66,310,058,000	70,513,365,000	74,716,672,000	78,919,979,000
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	61,010,312,894	64,596,602,712	68,182,892,531	71,769,182,350	75,355,472,169
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	11,435,152,434	13,443,693,972	15,452,235,511	17,460,777,050	19,469,318,589
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	49,575,160,460	51,152,908,740	52,730,657,020	54,308,405,300	55,886,153,580
1.3.5	Bantuan keuangan dari propinsi atau Pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-

Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan

RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine

Tabel 3.12
Proyeksi Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
2	BELANJA DAERAH					
2.1.	Belanja Tidak Langsung	368,885,086,114.83	402,909,752,936.86	436,934,419,758.88	470,959,086,580.90	504,983,753,402.92
2.1.1	Belanja Pegawai	311,876,351,443.23	334,564,633,998.86	357,252,916,554.48	379,941,199,110.10	402,629,481,665.72
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	32,083,786,003.20	38,776,705,019.00	45,469,624,034.80	52,162,543,050.60	58,855,462,066.40
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	24,524,948,668.40	29,168,413,919.00	33,811,879,169.60	38,455,344,420.20	43,098,809,670.80
2.1.8	Belanja Tak Terduga					
2.2.	Belanja Langsung	426,105,769,156.78	464,051,342,486.29	501,996,915,815.81	539,942,489,145.32	577,888,062,474.84
2.2.1	Belanja Pegawai	14,987,779,010.97	13,618,424,134.94	12,249,069,258.92	10,879,714,382.90	9,510,359,506.88
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199,648,992,006.90	220,969,198,133.40	242,289,404,259.90	263,609,610,386.40	284,929,816,512.90
2.2.3	Belanja Modal	211,468,998,138.91	229,463,720,217.95	247,458,442,296.99	265,453,164,376.02	283,447,886,455.06
	Total Belanja Daerah	794,990,855,271.61	866,961,095,423.15	938,931,335,574.69	1,010,901,575,726.22	1,082,871,815,877.76

Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan

3.1.3 Neraca Keuangan Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Dari tabel 3.13, rata-rata pertumbuhan aktiva atau aset Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2011-2015 sebesar 12,42 persen yang menandakan bahwa jumlah aktiva/aset Pemerintah Kota Tidore Kepulauan meningkat cukup signifikan. Aset tersebut terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Namun dari tahun 2014 ke 2015 total aset mengalami penurunan. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Tahun 2015, Kota Tidore Kepulauan memiliki aset senilai Rp. 1,149 Trilyun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2014 mencapai Rp. 1,194 Trilyun dan rata-rata tumbuh 13 persen pertahun. Aset tetap ini meliputi 92,14 persen dari seluruh aset Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di tahun 2014 dan meningkat menjadi 93,62 persen dari seluruh aset Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di tahun 2015 meskipun secara nominal nilainya menurun.

Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun 2011-2015 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Neraca Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	Aset					
1.1	Aset Lancar	51,041,961,419.26	73,780,462,475.04	65,404,970,675.85	79,924,015,314.89	59,814,915,241.00
1.2	Investasi Jangka Panjang	10,086,414,988.00	13,194,403,273.50	7,366,727,497.69	8,852,733,928.86	10,612,187,042.00
1.3	Aset Tetap	680,285,257,230.81	808,558,869,882.04	990,574,109,905.70	1,194,202,106,363.59	1,082,095,947,622.00
1.4	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.5	Aset Lainnya	2,325,681,191.00	3,962,140,991.00	10,281,163,849.67	13,104,126,582.78	8,407,459,598.00
	Jumlah aset	743,739,314,829.07	899,495,876,621.58	1,073,626,971,928.90	1,296,082,982,190.12	1,160,930,509,503.00
2	Kewajiban					
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	62,994,905.09	-	1,695,776,536.09	998,618,500.00	5,881,558,226.00
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban	62,994,905.09	-	1,695,776,536.09	998,618,500.00	5,881,558,226.00
3	Ekuitas Dana					
3.1	Ekuitas Dana Lancar	50,978,966,514.17	73,780,462,471.95	63,709,194,139.76	78,925,396,814.89	
3.2	Ekuitas Dana Investasi	692,697,353,409.81	825,715,414,143.54	1,008,222,001,253.05	1,216,158,966,875.23	
3.3	Ekuitas Dana Cadangan					
	Jumlah Ekuitas	743,676,319,923.98	899,495,876,615.49	1,071,931,195,392.81	1,295,084,363,690.12	1,155,048,987,277.00

Sumber : Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.5,881 Milyar. Dari tahun 2011 hingga 2015, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2012 dan tertinggi tahun 2015. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dan cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 mencapai Rp. 1,155 Trilyun dan mengalami pertumbuhan dari 2011-2015 dengan rata-rata pertumbuhan 12,53 persen pertahun.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun

demikian, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi kewajibannya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Tidore Kepulauan setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Nilai rasio lancar maupun rasio cepat pada tahun 2012 pada table rasio keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan disebabkan karena pada tahun tersebut nilai kewajiban jangka pendek nihil (nol).

Tabel 3.14
Rasio Keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Likuiditas					
a. Rasio Lancar (Current Ratio)	810.90	~	38.57	80.03	9.31
b. Rasio Cepat (Quick Ratio)	810.24	~	38.54	79.99	9.30
Rasio Solvabilitas					
a. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
b. Rasio Hutang Terhadap Modal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Kota Tidore Kepulauan adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap asset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan melakukan peminjaman dana untuk pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2016-2020

Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam rangka mensukseskan visi dan misi Walikota untuk pembangunan Kota Tidore Kepulauan adalah perlunya dukungan keuangan daerah yang sehat. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi unsur transparansi, efisien dan efektif dibutuhkan sesuatu kebijakan keuangan yang tepat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal dalam tahun 2016-2020 akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut: (1) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan (2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja; (3) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; (4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Cara yang terakhir ini misalnya dilakukan melalui kerjasama melalui model kerjasama masyarakat, swasta, dan pemerintah (*public-private partnership*). Cara yang terakhir ini perlu dilakukan mengingat kemampuan pemerintah daerah didalam menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya masih sangat terbatas. Untuk itu, pelibatan masyarakat dan kelompok bisnis menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

3.2.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya yang efektif dan efisien serta mendapatkan dukungan masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan :

- 1) Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
- 2) Mendayagunakan dana melalui pola deposito;

- 3) Perubahan manajemen keuangan dengan member peran lebih pada kas umum daerah;
- 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
- 5) Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ini diperlukan agar pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja. Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kota Tidore Kepulauan lebih banyak didominasi oleh sektor primer. Oleh karena itu, sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sector primer dan mata rantainya.

3.2.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Terdapat tiga elemen penting dalam menentukan belanja daerah, yaitu masyarakat sebagai pemberi amanat, Pemerintah Daerah, dan DPRD dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat. Sehingga hakekat anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.

Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap

menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Penggunaan anggaran untuk belanja barang dan jasa, berdasarkan pada patokan harga dasar yang telah ditetapkan dalam HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan).

3.2.3 Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
- 2) Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- 3) Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program jangka menengah Kota Tidore Kepulauan selama lima tahun, mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain :

- 1) Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- 2) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan asset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- 3) Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pegawai pemerintahan daerah.
- 4) Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- 5) Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Dengan mempertimbangkan Rasio Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2011 ke 2015 sebesar 39,33 %, Rasio peningkatan Perimbangan Daerah dari tahun 2011 ke 2015 sebesar 11,44% dan Rasio peningkatan Pendapatan lain-lain yang Sah dari Tahun 2011 ke 2015 sebesar 15,65% dengan mempertimbangkan ketiga ratio peningkatan sumber pendapatan tersebut, maka jumlah proyeksi pendapatan daerah tahun 2016-2020 Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Pendapatan	770,355,297,749	831,557,522,415	892,759,747,082	953,961,971,748	1,015,164,196,414
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	40,325,931,489	14,711,791,357	-31,445,626,333	-42,217,265,112	-52,988,903,892
	Total Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	810,702,646,629	846,287,107,869	861,328,291,551	911,755,254,144	962,182,216,737

Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan

Selanjutnya, setelah diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama lima tahun adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah untuk memenuhi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Berikut adalah gambaran penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dimaksud, sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.12 berikut :

RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine

Tabel 3.16
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	810,702,646,629	846,287,107,869	861,328,291,551	911,755,254,144	962,182,216,737
Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I						
II.a	Belanja Langsung	426,105,769,157	464,051,342,486	501,996,915,816	539,942,489,145	577,888,062,475
II.b	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Dikurangi					
II.c	Belanja langsung Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	-	-	-	-	-
II.d	Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	-	-	-	-	-
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a + II.b - II.c - II.d)	426,105,769,157	464,051,342,486	501,996,915,816	539,942,489,145	577,888,062,475
	Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Setelah Menghitung Alokasi Pengeluaran Prioritas I (I-II)	384,596,877,472	382,235,765,383	359,331,375,735	371,812,764,999	384,294,154,262
Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II						
III.a	Belanja Tidak Langsung	368,885,086,115	402,909,752,937	436,934,419,759	470,959,086,581	504,983,753,403
	Dikurangi					
III.b	Belanja tidak langsung Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	-	-	-	-	-
III	Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (III.a - III.b)	368,885,086,115	402,909,752,937	436,934,419,759	470,959,086,581	504,983,753,403
	Surplus Anggaran Riil atau Berimbang (I - II - III)	15,711,791,357	-20,673,987,554	-77,603,044,023	-99,146,321,582	-120,689,599,141